

**ANALISIS *GOVERNMENT EXPENDITURE*, PARTISIPASI ANGKATAN KERJA,
KRIMINALITAS DAN KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2012-2022**



NADIA PONTI WIJAYANTI

20313174

EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**ANALISIS *GOVERNMENT EXPENDITURE*, PARTISIPASI ANGKATAN KERJA,
KRIMINALITAS DAN KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2012-2022**

SKRIPSI

Disusun dan di ajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Nadia Ponti Wijayanti

Nomor Mahasiswa : 20313174

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat di kategorikan dalam tindakan plagiarisme seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Oktober 2024

Penulis,



Nadia Poni Wijayanti

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Pantadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 1347 /Ka.Div/10/Div.PP/X/2024

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Nadia Ponti Wijayanti**
Nomor Mahasiswa : **20313174**
Dosen Pembimbing : **Lak Lak Nazhat El Hasanah, S.E., M.Si**
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Judul Karya Ilmiah : **Analisis *Government Expenditure*, Partisipasi Angkatan Kerja, Kriminalitas dan Kepadatan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat 2012-2022**
Nomor Hp : **081903226426**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **11% (sebelas persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 18 Oktober 2024

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,



Suwardi S.IP., M.IP.

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

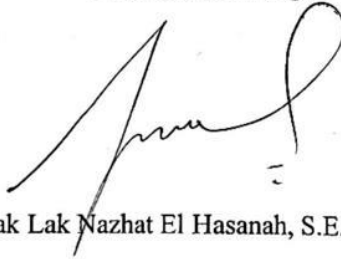
*Analisis Government Expenditure, Partisipasi Angkatan Kerja, Kriminalitas Dan Kepadatan
Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Barat 2012-2022*

Nama : Nadia Ponti Wijayanti
Nomor Mahasiswa : 20313174
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta,

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Lak Lak Nazhat El Hasanah, S.E., M.Si

BERITA ACARA SKRIPSI



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nomor: -

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Ganjil 2024/2025, hari Selasa, tanggal 05 November 2024, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : NADIA PONTI WIJAYANTI
NIM : 20313174
Judul Tugas Akhir : ANALISIS GOVERNMENT EXPENDITURE, PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA, KRIMINALITAS DAN KEPADATAN
PENDUDUK TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2012-2022
Dosen Pembimbing : Lak lak Nazhat El Hasanah, SE.,M.Si.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A/B
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Lak lak Nazhat El Hasanah, SE.,M.Si.
Anggota Tim : Drs. Awan Setya Dewanta, M.Ec.Dev.

Yogyakarta, 05 November 2024

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan,



Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.
NIK. 963130101

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS GOVERNMENT EXPENDITURE, PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, KRIMINALITAS
DAN KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN
BARAT 2012-2022**

Disusun oleh : NADIA PONTI WIJAYANTI

Nomor Mahasiswa : 20313174

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 05 November 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Lak lak Nazhat El Hasanah, SE.,M.Si.

Penguji : Drs. Awan Setya Dewanta, M.Ec.Dev.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah rabb semesta alam, dzat yang telah menciptakan surga dan neraka, dzat yang telah menciptakan tujuh langit berlapis beserta segala isi dan keindahan, kepada-Nya lah kita memohon pertolongan, kepada-Nya lah kita memohon ampunan. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya penulis selalu diberi kemudahan dan kelancaran sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan Analisis *Government Expenditure*, Partisipasi Angkatan Kerja, Kriminalitas Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Barat 2012-2022. Shalawat dan salam tak lupa selalu menyertai baginda nabi Muhammad *sallahualahiwasallam* beserta keluarga dan para sahabatnya. Tugas akhir skripsi ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam rangka menyelesaikan program studi Sarjana Strata satu (S1) di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas segala kritik dan saran kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Atas terlaksananya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua Orang Tua tercinta Bapak H. Setno dan Ibu Hj. Adminah atas kerja keras, doa dan dukungan yang telah menyertai setiap langkah dan aktivitas.
2. Yth. Ibu Lak Lak Nazhat El Hasanah, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang di tengah kesibukannya yang selalu meluangkan waktunya dengan sabar dan penuh perhatian membimbing serta memberikan dukungan moril hingga skripsi ini selesai;
3. Yth. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia;
4. Yth. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Kepala Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia;
5. Yth. Bapak Dr. Sahabuddin Sidiq, S.E., MA. selaku Kepala Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang telah memberikan ilmunya kepada kami;

7. Kepada abang tercinta Adam Purbani dan adik tersayang Wijaya Seto Nugroho yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
8. Kepada Galih Aji Priambada yang selalu menemani dan memberikan motivasi yang tak ada habisnya.
9. Kepada Luthfi Ikhsan dan Jorghi Ersal Putra selaku teman seperjuangan menulis tugas akhir skripsi
10. Kepada, Seluruh rekan-rekan IE 2020, dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Kalian adalah teman-teman terbaik, bersama kalian penulis dapat menemukan makna dalam persahabatan dan solidaritas untuk sukses bagi kalian semua;

Akhir kata, Apabila yang ada didepan membuatmu takut, dan yang dibelakang membuatmu luka, lihatlah ke atas, sungguh Allah tidak pernah gagal menolongmu.

Yogyakarta,

Penulis,



Nadia Ponti Wijayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 11.2 121.3 131.4 13	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 142.2 182.2.1182.2.2212.2.3232.2.4252.2.5272.3 282.3.1282.3.2282.3.3 292.3.429	
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 313.2 313.2.1323.2.2Error! Bookmark not defined.3.3 323.4 323.5 323.6 333.6.1343.6.2343.6.3343.7 353.7.1353.7.2353.7.336	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 374.2 384.3 394.4 424.5 424.6 434.7 434.8 44	
BAB V KESIMPULAN	47
5.1 46	
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 5 Provinsi Dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbesar di Indonesia	3
Gambar 1.2 Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan	4
Gambar 1.3 Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat	5
Gambar 1.4 Belanja Pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat	7
Gambar 1.5 TPAK Di Provinsi Kalimantan Barat	8
Gambar 1.6 Kriminalitas di Provinsi Kalimantan Barat	10
Gambar 1.7 Jumlah Penduduk Di Provinsi Kalimantan Barat	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia	3
Tabel 2.1 Kajian Pustaka	14
Tabel 4.1 Hasil Uji Deskriptif	38
Tabel 4.2 Hasil Pengujian CE, FE, RE	39
Tabel 4.3 Hasil <i>Uji Chow</i>	40
Tabel 4.4 Hasil <i>Uji Hausman</i>	41
Tabel 4.5 Hasil <i>Uji Lagrange Multiplier</i>	41
Tabel 4.6 Hasil <i>Fixed Effect</i>	42

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah, partisipasi angkatan kerja, kriminalitas dan kepadatan penduduk terhadap kemiskinan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2012-2022. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan pendekatan model data panel dan dianalisis dengan perangkat lunak Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah, partisipasi angkatan kerja, kriminalitas dan kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Pengujian model menggunakan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier menunjukkan bahwa model Common Effect adalah model terbaik yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat dan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Kata Kunci : Belanja Pemerintah, Partisipasi Angkatan Kerja, Kriminalitas, Kepadatan Penduduk, Kemiskinan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang mendesak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, dengan jutaan orang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Khamilah (2019) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan sangat kompleks, mulai dari rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya akses kesehatan, hingga kurangnya lapangan kerja. Banyak masyarakat terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Misalnya, anak-anak yang lahir di keluarga miskin sering kali tidak mendapatkan pendidikan yang baik, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Safuridar & Putri (2019) menyatakan kemiskinan juga berdampak luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Tingginya angka kemiskinan dapat memicu berbagai masalah sosial, seperti kriminalitas, konflik, dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan nasional.

Provinsi Kalimantan Barat menghadapi tantangan serius terkait kemiskinan, meskipun memiliki banyak sumber daya alam. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi, dengan banyak masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Anggun & Sari (2024) menyatakan bahwa ketergantungan pada sektor pertanian dan perkebunan yang tidak dikelola dengan baik turut berkontribusi pada masalah kemiskinan. Banyak petani kecil yang kesulitan mendapatkan harga yang adil untuk hasil panen mereka, sementara akses terhadap modal dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas masih sangat terbatas. Kemiskinan adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik individu maupun struktural. Memahami faktor-faktor seperti, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan sosial budaya sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam penanganan kemiskinan (Edna Safitri et al., 2022). Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan. Masyarakat yang kurang berpendidikan memiliki keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga sulit untuk meningkatkan taraf hidup. Pendidikan yang tidak memadai juga mengakibatkan rendahnya kesadaran akan kesehatan dan

pentingnya perencanaan ekonomi. Akses terbatas terhadap layanan kesehatan berdampak besar pada kualitas hidup masyarakat. Penyakit yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan biaya yang tinggi dan mengurangi produktivitas. Kesehatan yang buruk juga berimplikasi pada kemampuan individu untuk bekerja secara optimal. Menurut Putriana & Aji (2022) Tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup dan berkualitas sangat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Di banyak daerah, lapangan kerja yang tersedia sering kali tidak memadai atau tidak sesuai dengan keterampilan masyarakat, sehingga mereka terpaksa menerima pekerjaan dengan upah rendah. Faktor sosial dan budaya, seperti norma dan nilai yang dianut masyarakat, juga dapat memengaruhi tingkat kemiskinan. Misalnya, diskriminasi terhadap kelompok tertentu atau praktik tradisional yang menghalangi akses pendidikan dan pekerjaan dapat memperkuat kemiskinan.

Menurut Agus Triono & Sangaji (2023), kemiskinan di Indonesia adalah isu sosial yang kompleks dan terus menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, angka kemiskinan masih mencerminkan kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jutaan penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan di Indonesia tidak hanya diukur dari segi pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah mencakup berbagai kebutuhan seperti pangan, sandang, dan papan. Selain itu, kemiskinan juga dapat bersifat multidimensi, yang mencakup keterbatasan dalam akses terhadap layanan sosial dan ekonomi. A. Fadillah (2021) menyatakan bahwa kemiskinan memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan. Tingginya angka kemiskinan dapat memicu berbagai masalah sosial, seperti kriminalitas, konflik, dan ketidakstabilan politik. Selain itu, kemiskinan berkontribusi pada masalah kesehatan masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBUAN Jiwa)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
2017	27.771.22	10.12
2018	25.949.80	9.66
2019	25.144.72	9.41
2020	26.424.02	9.78
2021	27.542.77	9.71
2022	26.161.16	9.54

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel 1.1 bisa kita lihat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2018 penduduk miskin berkurang sangat pesat dari 27.771.22 menjadi 25.949.80. Kemudian jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan kembali akibat adanya pandemi COVID-19. Lalu dapat disimpulkan bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia tergolong fluktuatif yaitu mengalami kenaikan dan penurunan ditahun tahun berikutnya.

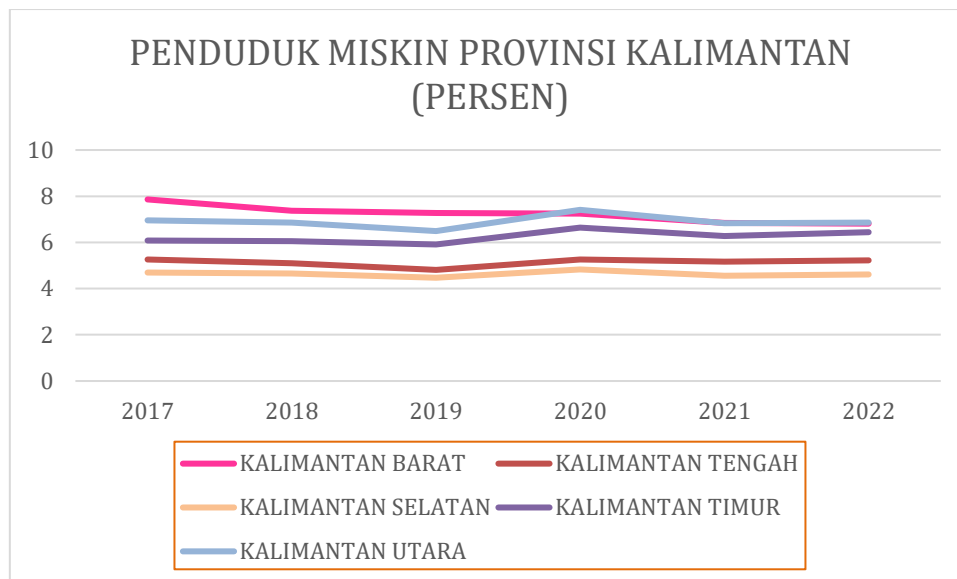


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1.1 5 Provinsi Dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbesar di Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.1 tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia peringkat pertama diduduki oleh Provinsi Jawa Timur lalu disusul oleh Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur. Kemiskinan di Jawa Timur sendiri mengalami tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 4572.73 ribu jiwa dan pada tahun berikutnya dapat dikatakan bahwa Jawa Timur mengalami penurunan menjadi 4181.29 ribu jiwa.

Kalimantan merupakan pulau ketiga terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, adalah wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan potensi ekonomi yang besar. Namun, meskipun sumber daya alam yang melimpah, terdapat perbedaan yang mencolok dalam tingkat kemiskinan di berbagai provinsi di Kalimantan. Tingkat kemiskinan yang tinggi sering kali dihubungkan dengan terbatasnya infrastruktur dan akses yang minim terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, angka kemiskinan yang lebih rendah dapat dijelaskan oleh kemajuan dalam pengembangan sektor ekonomi yang lebih bervariasi serta peningkatan infrastruktur yang substansial (Asynur, 2023).

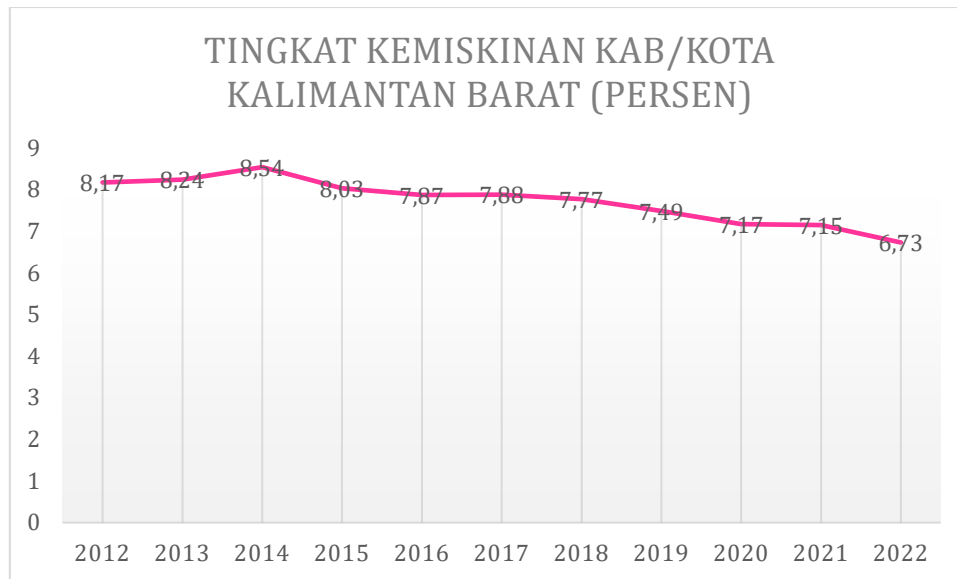


Sumber : Badan Pusat Statistika Kalimantan Barat

Gambar 1.2 Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa, tingkat penduduk miskin di seluruh provinsi Kalimantan tidak merata. Kalimantan Selatan memiliki tingkat penduduk miskin paling rendah dan stabil dibandingkan dengan 4 provinsi yang lain. Pada tahun 2017, Kalimantan Barat memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi diantara yang lain, yaitu 7,86%. Tingkat kemiskinan yang tinggi ini sering kali dihubungkan dengan berbagai faktor struktural dan sosial. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya infrastruktur yang memadai. Banyak kawasan di Kalimantan Barat, terutama di area pedalaman, mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas dasar seperti jalan, listrik, dan sistem transportasi yang efisien. Kekurangan ini menghambat mobilitas dan akses masyarakat ke peluang ekonomi serta layanan publik penting, seperti pendidikan dan kesehatan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memahami lebih dalam tentang dinamika kemiskinan di Indonesia, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi, dampaknya terhadap masyarakat, serta solusi yang dapat di implementasikan untuk mengurangi angka kemiskinan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kemiskinan, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam memberantas kemiskinan di Indonesia.

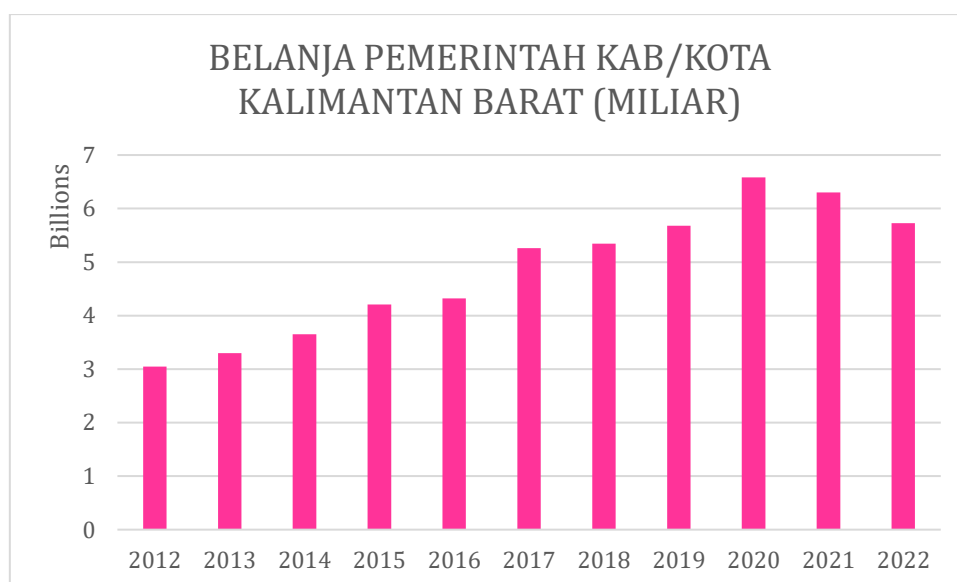


Sumber : Badan Pusat Statistika Kalimantan Barat

Gambar 1.3 Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat

Menurut Lestari et al. (2018), belanja pemerintah adalah salah satu elemen kunci dalam perekonomian suatu negara dan memiliki peran vital dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui pengeluaran yang terencana, pemerintah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, belanja pemerintah mencakup berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial. Belanja pemerintah berfungsi sebagai alat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan pengeluaran di sektor-sektor strategis, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong investasi. Program-program seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatur belanja, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa belanja pemerintah sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Meskipun belanja pemerintah memiliki dampak positif, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah masalah efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (Bandiyono, 2018). Banyak program yang tidak berjalan sesuai rencana, dan terkadang pengeluaran tidak tepat sasaran. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan anggaran merupakan isu serius yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pembangunan

Belanja pemerintah mencakup semua pengeluaran yang dilakukan untuk mendukung program-program publik, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dalam konteks kemiskinan, belanja pemerintah berupaya memberikan dukungan langsung kepada masyarakat miskin melalui program bantuan sosial dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif (Safitri et al., 2021). Belanja pemerintah yang diarahkan dengan baik dapat menghasilkan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan. Program-program bantuan sosial telah terbukti membantu meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi angka putus sekolah, dan meningkatkan kesehatan. Untuk meningkatkan efektivitas belanja pemerintah dalam menangani kemiskinan, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi dan fokus pada kebutuhan masyarakat (Septiani & Kusumastuti, 2019). Ini mencakup peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi program, serta kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja pemerintah di bidang sosial (seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Di provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi seperti Kalimantan Barat, anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk sektor-sektor ini dapat langsung memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar yang diperlukan untuk keluar dari kemiskinan.



Sumber : Badan Pusat Statistika Kalimantan Barat

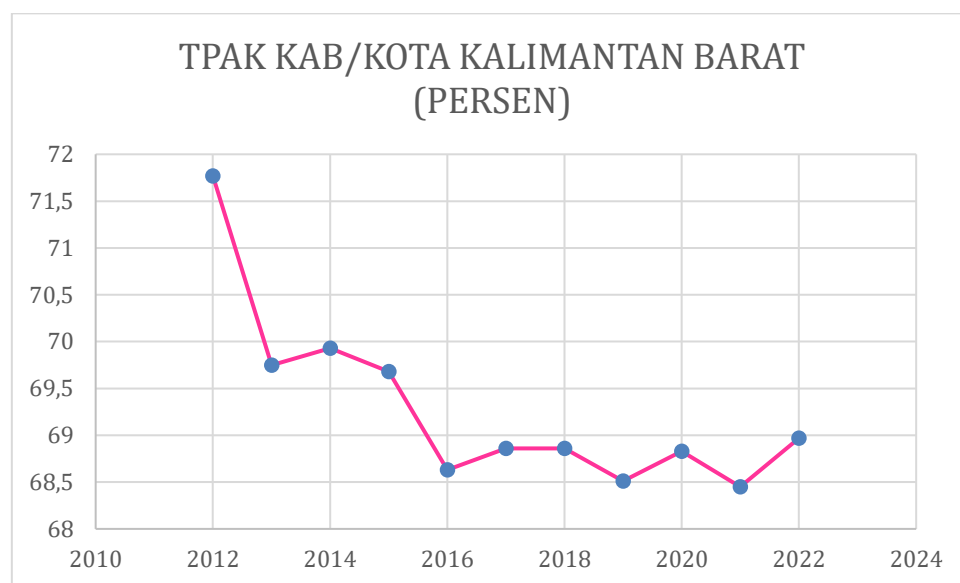
Gambar 1.4 Belanja Pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat

Belanja Pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuatif yaitu kenaikan dan penurunan ditahun tahun berikutnya yang dapat dilihat pada grafik di atas. Pada tahun 2019, realisasi belanja pemerintah sebesar 5.677.397.310. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari 5.677.397.310 menjadi 6.582.879.812. Akan tetapi, pada tahun-tahun berikutnya, realisasi belanja pemerintah mengalami penurunan.

Selain belanja pemerintah, partisipasi angkatan kerja menjadi indikator penting dalam menilai kondisi perekonomian suatu negara. Di Indonesia, tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan seberapa besar kontribusi penduduk dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Memahami dinamika ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Partisipasi angkatan kerja mengacu pada proporsi penduduk usia produktif yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Ini mencakup individu yang bekerja, baik di sektor formal maupun informal, serta mereka yang mencari pekerjaan (Murianti & Romanda, 2020). Tingkat partisipasi sering digunakan untuk mengukur potensi ekonomi dan kesehatan pasar tenaga kerja suatu negara. Tingginya partisipasi angkatan kerja memberikan dampak positif bagi perekonomian. Ini dapat menghasilkan peningkatan produktivitas, pendapatan yang lebih tinggi, dan pengurangan kemiskinan. Ketika lebih banyak individu terlibat dalam kegiatan ekonomi, potensi pertumbuhan ekonomi juga meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Ramadhan & Setyowati, 2023).

Menurut Wahyuni & Anis (2019), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Indonesia merupakan indikator penting yang mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks kemiskinan, TPAK memiliki peranan signifikan dalam menentukan seberapa efektif masyarakat terlibat dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Di Indonesia, tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan variasi yang signifikan antara daerah dan kelompok demografis. Meskipun ada kemajuan, banyak daerah terpencil dan masyarakat berpendidikan rendah masih mengalami partisipasi yang rendah. Hal ini berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan, terutama di wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Tingginya TPAK dapat menjadi alat penting dalam mengurangi kemiskinan. Partisipasi angkatan kerja yang tinggi seringkali berhubungan dengan meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Namun, meskipun banyak individu terlibat dalam pasar tenaga kerja, banyak yang terjebak di sektor informal dengan upah yang rendah, yang tidak cukup untuk mengangkat mereka dari kemiskinan (Ashari & Athoillah, 2023). Rendahnya

tingkat partisipasi angkatan kerja memengaruhi efektivitas program-program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat sering kali gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, memahami dinamika TPAK sangat penting dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. TPAK mengukur persentase angkatan kerja yang aktif mencari atau bekerja, dan ini sangat erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan. Di daerah dengan TPAK yang rendah, banyak individu yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi, yang berpotensi menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Hal ini penting karena jika sebagian besar penduduk tidak bekerja, maka pendapatan masyarakat akan terbatas, memperburuk kondisi kemiskinan.



Sumber : Badan Pusat Statistika Kalimantan Barat

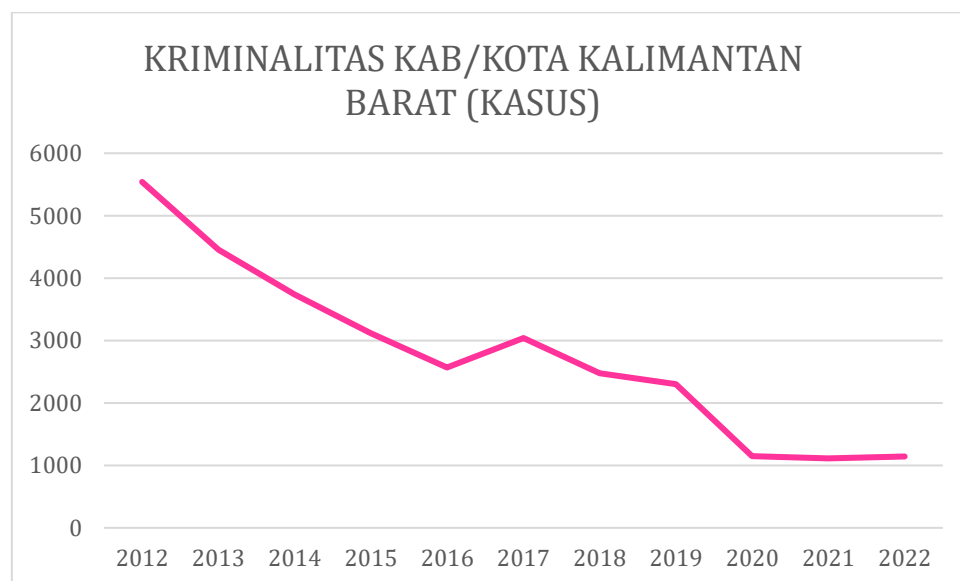
Gambar 1.5 TPAK Di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan gambar 1.5 TPAK juga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2012 TPAK sebesar 71,77%, akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan yang sangat pesat dari 71,77% menjadi 69,93%. Kemudian mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

Kriminalitas adalah fenomena sosial yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat serta pembangunan suatu negara. Di Indonesia, tingkat kriminalitas yang tinggi menjadi perhatian serius bagi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Memahami dinamika dan penyebab kriminalitas sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangannya. Di Indonesia, kriminalitas didefinisikan sebagai

tindakan yang melanggar hukum dan dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat. Beragam jenis kejahatan terjadi, mulai dari pelanggaran ringan seperti pencurian kecil dan vandalisme, hingga kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan (Kamila et al., 2023). Selain itu, terdapat pula kriminalitas terorganisir yang melibatkan kelompok tertentu, seperti perdagangan narkoba dan trafficking, serta kriminalitas siber yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Penyebab kriminalitas di Indonesia sangat beragam dan sering kali saling terkait.

Menurut Hazeng et al. (2021), lingkungan keluarga dan pergaulan juga memainkan peran penting dalam fenomena ini. Keluarga yang tidak harmonis dan pengaruh teman sebaya yang negatif dapat meningkatkan kemungkinan individu terlibat dalam kriminalitas. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan ketidakadilan dalam sistem hukum sering membuat pelaku kejahatan merasa bebas untuk beraksi tanpa takut akan konsekuensi hukum. Dampak dari kriminalitas tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat. Ketidakamanan yang dihasilkan dari tingginya tingkat kriminalitas menciptakan rasa cemas dan was-was di kalangan masyarakat, yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Program pemberdayaan ekonomi juga diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan, yang diharapkan dapat mengurangi angka kriminalitas (Syawal Ibraya et al., 2023). Tingginya angka kriminalitas suatu daerah dapat mempengaruhi investasi yang masuk ke daerah tersebut karena menimbulkan rasa tidak aman dan dapat menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi sehingga angka kemiskinan akan meningkat.



Sumber : Badan Pusat Statistika Kalimantan Barat

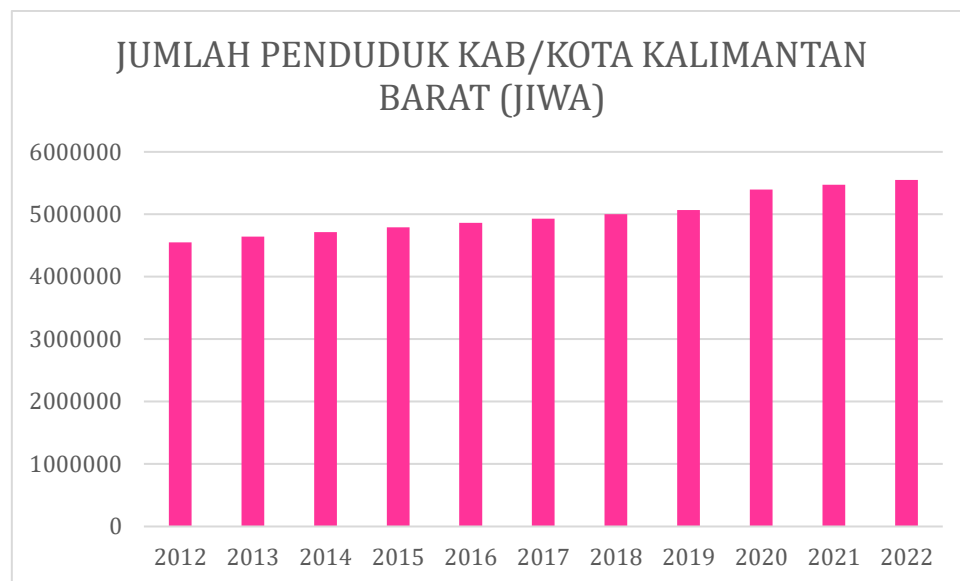
Gambar 1.6 Kriminalitas di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan gambar 1.6 Kriminalitas juga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 kriminalitas terjadi sebanyak 2.569 kasus. Kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari 2.569 kasus menjadi 3.038 kasus. Kemudian mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

Kepadatan penduduk merupakan salah satu isu penting yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia. Dengan populasi yang terus bertambah, pengelolaan kepadatan penduduk menjadi tantangan yang harus dihadapi agar dapat menciptakan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia mengalami pertumbuhan populasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sabiq & Nurwati (2021) menyatakan bahwa, salah satu penyebab utama tingginya kepadatan penduduk di daerah perkotaan adalah migrasi dari pedesaan ke kota. Banyak individu dan keluarga yang berpindah ke kota dengan harapan mendapatkan peluang kerja yang lebih baik serta akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, perpindahan ini juga menyebabkan berbagai masalah, seperti peningkatan kemacetan, pencemaran, dan penurunan kualitas hidup di kawasan perkotaan. Kepadatan penduduk memiliki dampak yang luas terhadap berbagai sektor. Emilia & Sirilius (2021) menyatakan bahwa, dalam sektor ekonomi, pertumbuhan populasi dapat menambah tekanan pada pasar tenaga kerja dan infrastruktur, berpotensi menyebabkan pengangguran dan kemiskinan. Dari sudut pandang lingkungan, kepadatan yang tinggi berkontribusi pada kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan pencemaran. Selain itu, layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi sering kali mengalami tekanan akibat meningkatnya permintaan.

Menurut Nur Azizah et al. (2022), tingginya kepadatan penduduk berkontribusi langsung pada meningkatnya angka kemiskinan. Dengan semakin banyak penduduk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dan sumber daya, peluang untuk memperoleh kehidupan yang layak menjadi semakin terbatas. Akibatnya, banyak individu dan keluarga terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diatasi. Mereka yang tinggal di daerah padat sering kali memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi yang baik. Selain itu, ketidakadilan sosial dan ekonomi diperparah oleh kepadatan penduduk. Di daerah

dengan populasi tinggi, kelompok-kelompok marginal sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar (Sabiq & Nurwati, 2021). Mereka yang hidup dalam kondisi rentan lebih mudah terjebak dalam kemiskinan, sehingga menciptakan jurang yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin. Kepadatan penduduk mempengaruhi banyak aspek sosial dan ekonomi yang berkaitan langsung dengan kondisi kemiskinan. Kepadatan yang tinggi dapat membebani infrastruktur, memperburuk persaingan dalam pasar kerja, mengurangi akses ke layanan dasar, dan meningkatkan biaya hidup (Mita & Usman, 2018).



Sumber : Badan Pusat Statistika Kalimantan Barat

Gambar 1.7 Jumlah Penduduk Di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan gambar 1.7 Jumlah penduduk mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan cukup pesat terjadi pada tahun 2019 ke 2020. Pada tahun 2019 jumlah penduduk sebanyak 5.069.127 jiwa dan mengalami kenaikan tahun 2020 menjadi 5.396.821. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami kenaikan.

Dengan adanya masalah-masalah seperti diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis *Government Expenditure*, Partisipasi Angkatan Kerja, Kriminalitas dan Kepadatan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mencari tahu pokok permasalahan diatas sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Bagaimana pengaruh partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat?
3. Bagaimana pengaruh kriminalitas terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat?
4. Bagaimana pengaruh kepadatan penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variable dependen dan variable independent secara individual maupun simultan :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kriminalitas terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepadatan penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademis atau Mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan untuk bahan perbandingan objek penelitian yang sama khususnya tentang kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Bagian ini memiliki beberapa tujuan yaitu, dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil dari penelitian terkait, menjadi penghubung penelitian untuk mengisi kesenjangan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian pustaka ini menjadi perbandingan antara penelitian yang sudah dilakukan terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut adalah penelitian yang diambil dari beberapa jurnal yang memiliki kesamaan topik dan tema yang digunakan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi adalah sebagai berikut :

Khamilah (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Selatan”. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independent yaitu, pengeluaran pemerintah,, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi kalimantan Selatan, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

N. Fadillah & Sabar (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Efek Belanja Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran, dan Kemiskinan di Kabupaten Gowa”. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier. Penelitian ini menggunakan 2 variabel independent yaitu, belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini adalah variabel belanja pemerintah sektor Pendidikan, Kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, dan kemiskinan di Kabupaten Gowa. Sedangkan variabel belanja pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negative, dan signifikan terhadap Kemiskinan melalui pengangguran. Sedangkan variabel belanja pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan melalui

pengangguran. Variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Gowa.

Ashari & Athoillah (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh TPT, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Tapal Kuda”. Data yang digunakan adalah data sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Penelitian ini menggunakan 6 variabel independent yaitu pengangguran terbuka, partisipasi Angkatan kerja, upah minimum, IPM, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Hasil penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka signifikan menambah jumlah kemiskinan di Kawasan Tapal Kuda. Penurunan partisipasi angkatan kerja menambah jumlah kemiskinan di Kawasan Tapal Kuda. Upah Minimum menambah jumlah kemiskinan di Kawasan Tapal Kuda. Penurunan IPM menambah jumlah kemiskinan di Kawasan Tapal Kuda. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menambah jumlah kemiskinan di Kawasan Tapal Kuda. Peningkatan jumlah penduduk menambah jumlah kemiskinan di Kawasan Tapal Kuda.

Tabel 2.1
Kajian Pustaka

NO	PENULIS DAN JUDUL	METODE DAN HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Penulis : Evita & Primandhana, (2022) Judul : Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja	Metode : Kuantitatif Hasil Penelitian : Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap Kemiskinan. Jika belanja pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk proyek infrastruktur atau sektor yang tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, maka	1. Meneliti variable independent yang sama yaitu belanja pemerintah 2. Meneliti variable dependen yang sama yaitu kemiskinan	1. Lokasi yang diteliti berbeda 2. Variabel independent yang berbeda

	Pemerintah Terhadap kemiskinan Di Kabupaten Blora	manfaatnya bisa terabaikan bagi kelompok rentan. Tanpa program yang tepat sasaran, kemiskinan bisa tetap tinggi atau bahkan meningkat	3. Metode yang digunakan sama	
2	Penulis : Ashari & Athoillah, (2023) Judul : Analisis Pengaruh TPT, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Tapal Kuda.	Metode : Kuantitatif Hasil Penelitian : partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap kemiskinan. Dengan meningkatnya TPAK, lebih banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang mengakibatkan penurunan pendapatan. Keluarga yang kehilangan sumber penghasilan utama akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan	1. Meneliti variable independent yang sama 2. Meneliti variable dependen yang sama 3. Metode yang digunakan sama	1. Meneliti variable independent yang berbeda 2. Lokasi yang diteliti berbeda 3. Periode waktu penelitian yang berbeda
3	Penulis :	Metode : Kuantitatif Hasil Penelitian : kriminalitas memiliki	1. Meneliti variable	1. Meneliti variable

	Muhamad Rizky Maarif (2022) Judul : Analisis Pengaruh Kriminalitas, Anggaran Pendidikan, Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di 9 Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2018	pengaruh terhadap kemiskinan. Ketika kemiskinan menurun, mungkin ada lebih banyak sumber daya dan kesempatan yang tersedia, tetapi tidak semua orang memiliki akses yang sama. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan bisa memicu kecemburuan sosial, yang dapat mendorong perilaku kriminal.	dependen yang sama 2. Metode yang digunakan sama 3. Meneliti variable independent yang sama	independent yang berbeda 2. Lokasi penelitian berbeda 3. Periode waktu penelitian berbeda
4	Penulis : Agustina et al., (2019) Judul : Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh	Metode : Kuantitatif Hasil Penelitian : Kepadatan Penduduk tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan. dikarenakan jumlah penduduk selalu bertambah, sementara kemiskinan cenderung menurun walaupun masih jauh di atas rata rata kemiskinan nasional. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi	1. Meneliti variabel dependen yang sama 2. Metode penelitian yang sama 3. Meneliti variabel independent yang sama	1. Meneliti variable independent yang berbeda 2. Lokasi penelitian yang berbeda 3. Periode waktu yang berbeda

		biasanya memiliki ekonomi yang bervariasi dan lebih banyak kesempatan kerja.		
5	Penulis : Mita & Usman (2018) Judul : Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau	Metode : Kuantitatif Hasil Penelitian : Jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Bertambahnya penduduk tiap tahunnya akan dijadikan sebagai faktor persaingan ekonomi yang akan menurunkan pendapatan masyarakat sehingga kemiskinan akan meningkat.	1. Meneliti variable kemiskinan dan jumlah penduduk 2. Metode penelitian sama	1. Meneliti variable independen yang berbeda 2. Lokasi penelitian yang berbeda 3. Periode waktu yang berbeda

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kemiskinan

Terdapat banyak pemahaman dan definisi tentang kemiskinan. Menurut (Tri Darmawanto, 2023), kemiskinan merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Secara umum, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara memadai, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, serta akses ke layanan kesehatan dan pendidikan.

Menurut *World Bank* (2021), kemiskinan diartikan sebagai situasi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. ada tiga ciri utama kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga berada di dekat garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP 1,55 dolar AS per hari, sehingga banyak orang yang tidak dianggap miskin secara resmi, tetapi masih rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan yang didasarkan pada pendapatan tidak sepenuhnya mencerminkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak individu yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan, tetapi dianggap miskin karena kurangnya akses ke layanan dasar dan rendahnya indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat luas dan keragaman wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan karakteristik penting dari kemiskinan di negara ini.

Definisi ini meliputi berbagai dimensi kemiskinan, termasuk kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada keadaan di mana seseorang tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Sementara itu, kemiskinan relatif menggambarkan kekurangan yang dialami seseorang dibandingkan dengan standar kehidupan rata-rata di masyarakat di mana mereka tinggal (*UNDP*, 2022).

Ukuran Kemiskinan

Menurut Leli Safitri & Effendi (2019), mengukur kemiskinan digunakan dengan dua ukuran yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang diukur dengan membandingkan pendapatan yang diperoleh dengan pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Garis kemiskinan adalah batas pendapatan riil yang digunakan untuk kebutuhan dasar tersebut. Kemiskinan absolut terjadi ketika pendapatan yang diterima oleh individu berada di bawah garis kemiskinan, sehingga pendapatan yang ada tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah ukuran kemiskinan yang fokus pada perbandingan distribusi pendapatan. Meskipun seseorang mungkin memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, jika pendapatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan orang lain di sekitarnya, maka orang tersebut dianggap miskin. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan di wilayah tersebut.

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Adawiyah (2020), ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan secara umum :

1. Faktor Individual : Berhubungan dengan aspek-aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan mental dari individu yang miskin. Kemiskinan pada individu dapat disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan mereka sendiri dalam menghadapi tantangan kehidupan.
2. Faktor Sosial : Mengacu pada kondisi lingkungan sosial yang dapat membuat seseorang terjebak dalam kemiskinan. Contohnya termasuk diskriminasi berdasarkan usia, gender, atau etnis yang dapat menyebabkan seseorang menjadi miskin. Faktor ini juga mencakup kondisi sosial dan ekonomi keluarga individu, yang seringkali menyebabkan kemiskinan berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. Faktor Kultural : Berkaitan dengan kondisi atau kualitas budaya yang berkontribusi pada kemiskinan. Faktor ini sering kali merujuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan, yang menghubungkan kebiasaan hidup dan nilai-nilai budaya dengan keadaan kemiskinan.
4. Faktor Struktural : Mengacu pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak responsif, dan sulit diakses, yang mengakibatkan seseorang atau kelompok terjebak dalam kemiskinan. Misalnya, penerapan sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia telah membuat petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjebak oleh pajak dan iklim investasi yang lebih menguntungkan orang kaya dan investor asing, sehingga mereka terus memperbesar kekayaan mereka.

Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Nurhadi dalam (Dimas Lutfi Adhi N, 2019) kemiskinan dibagi menjadi 3 yaitu, kemiskinan ekonomi, kemiskinan sosial dan kemiskinan politik.

1. Kemiskinan Ekonomi

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dipahami sebagai kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, sumber daya tidak hanya mencakup aspek

finansial, tetapi juga melibatkan segala bentuk kekayaan yang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

2. Kemiskinan Sosial

Dalam konteks sosial, kemiskinan merujuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang dapat membantu individu mendapatkan peluang untuk meningkatkan produktivitas mereka. Faktor-faktor ini bisa bersifat internal maupun eksternal.

3. Kemiskinan Politik

Dalam konteks politik, kemiskinan dapat diukur dari sejauh mana akses seseorang terhadap kekuasaan. Kekuasaan di sini melibatkan sistem politik yang mempengaruhi kemampuan kelompok tertentu dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya.

2.2.2 *Government Expenditure*

Menurut Palayukan (2019), Belanja pemerintah adalah salah satu komponen dari permintaan agregat. Dalam pendekatan pengeluaran untuk menghitung pendapatan nasional, terdapat rumus $Y = C + I + G + (X - M)$. Rumus ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y dan memantau perubahan dari waktu ke waktu, kita dapat menilai seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan pendapatan nasional.

Konsep dan Teori Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah mengacu pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai kepentingan, seperti penyediaan barang dan jasa publik, transfer pembayaran, serta investasi dalam infrastruktur. Menurut Hatta (2018), pengeluaran ini merupakan salah satu elemen dari permintaan agregat dalam ekonomi dan memiliki peran signifikan dalam memengaruhi tingkat aktivitas ekonomi, distribusi pendapatan, serta kesejahteraan sosial.

1. Teori Keynesian

Dalam pandangan teori Keynesian, belanja pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi permintaan agregat dan kestabilan ekonomi. Keynesians berpendapat bahwa selama masa resesi, pemerintah perlu meningkatkan

pengeluarannya untuk merangsang permintaan agregat dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan cara ini, belanja pemerintah dapat mengisi kekurangan dalam permintaan dari sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Keynes, 1936).

2. Teori Penawaran

Berbeda dengan teori Keynesian, teori penawaran berfokus pada dampak pengeluaran pemerintah terhadap sisi penawaran ekonomi. Teori ini berargumen bahwa belanja pemerintah yang efektif dapat meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas. Misalnya, investasi dalam infrastruktur dan pendidikan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Lucas, 1988).

3. Teori Kesejahteraan

Teori kesejahteraan, yang dikembangkan oleh ekonom seperti Arthur Pigou, berpendapat bahwa belanja pemerintah diperlukan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih adil dan menyediakan barang-barang publik yang tidak bisa diproduksi secara efisien oleh sektor swasta. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer pembayaran dan subsidi dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Pigou, 1920).

4. Teori Fiskal

Teori fiskal menyoroti pentingnya kebijakan fiskal dalam mengelola perekonomian. Ini melibatkan penggunaan belanja pemerintah dan perpajakan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kestabilan harga. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat mengatasi fluktuasi ekonomi dan mencapai tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan berkelanjutan dan pengendalian inflasi (Barro, 1990).

Dampak Belanja Pemerintah :

(Lestari et al., 2018) menyatakan bahwa belanja pemerintah dapat memberikan dampak terhadap perekonomian di suatu negara, yaitu :

1. Dampak pada Pertumbuhan Ekonomi

Belanja pemerintah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pengeluaran untuk infrastruktur dan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi ekonomi (Barro, 1991).

2. Dampak pada Distribusi Pendapatan

Melalui transfer pembayaran dan subsidi, belanja pemerintah berpotensi mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung (Mankiw, 2014).

3. Dampak pada Stabilitas Ekonomi

Kebijakan fiskal, yang mencakup belanja pemerintah, dapat digunakan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dan meredakan dampak resesi. Pengeluaran pemerintah yang dikelola dengan baik dapat mendukung stabilitas ekonomi dan mengurangi volatilitas dalam siklus bisnis (Blanchard & Johnson, 2013).

2.2.3 Partisipasi Angkatan Kerja

Partisipasi angkatan kerja merujuk pada bagian dari populasi usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Ini merupakan komponen penting dalam ekonomi negara karena berhubungan langsung dengan tenaga kerja yang berkontribusi pada proses produksi dan pertumbuhan ekonomi (Ashari & Athoillah, 2023).

Teori Mengenai Partisipasi Angkatan Kerja

1. Teori Ekonomi Klasik

Dalam teori ekonomi klasik, yang dipelopori oleh ekonom seperti Adam Smith dan David Ricardo, dinyatakan bahwa partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti tingkat gaji dan kondisi pasar tenaga kerja. Berdasarkan pandangan ini, individu lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja apabila terdapat insentif ekonomi yang memadai, seperti gaji yang tinggi. Dengan kata lain, partisipasi angkatan kerja dipandang sebagai hasil dari interaksi antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar.

2. Teori *Human Capital*

Gary Becker mengembangkan teori human capital yang menekankan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan individu, yang pada gilirannya mempengaruhi keterlibatan mereka dalam pasar kerja. Teori ini berpendapat bahwa individu dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam angkatan kerja dan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik.

3. Teori Struktur Sosial

Teori struktur sosial, yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim dan Max Weber, mempelajari bagaimana struktur sosial dan norma budaya mempengaruhi partisipasi angkatan kerja. Faktor-faktor seperti stratifikasi sosial, peran gender, dan dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan individu untuk bekerja. Sebagai contoh, norma gender tradisional bisa mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan di berbagai masyarakat.

4. Teori Keterlibatan dan Motivasi

Teori keterlibatan dan motivasi, yang dikembangkan oleh Abraham Maslow dan Frederick Herzberg, menggarisbawahi pentingnya motivasi individu dalam menentukan partisipasi angkatan kerja. Teori ini menganggap bahwa kebutuhan dasar, rasa aman, dan keinginan untuk aktualisasi diri mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam pekerjaan. Lingkungan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Angkatan Kerja

1. Faktor Ekonomi

Faktor-faktor ekonomi seperti kondisi pasar kerja, tingkat gaji, dan ketersediaan pekerjaan memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat partisipasi angkatan kerja. Ketersediaan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan minat individu serta kompensasi yang ditawarkan dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk bergabung atau tetap aktif dalam angkatan kerja.

2. Faktor Sosial dan Budaya

Aspek sosial dan budaya, seperti norma sosial, struktur keluarga, dan kebijakan pemerintah, juga mempengaruhi partisipasi dalam angkatan kerja. Misalnya, kebijakan seperti cuti melahirkan dan fasilitas penitipan anak dapat mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan di dunia kerja. Selain itu, norma budaya terkait peran gender dan ekspektasi sosial juga dapat memengaruhi tingkat partisipasi.

3. Faktor Pendidikan dan Keterampilan

Pendidikan dan keterampilan individu merupakan faktor utama yang mempengaruhi partisipasi angkatan kerja. Pendidikan yang lebih tinggi dan keterampilan yang relevan dapat menciptakan peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan kemungkinan seseorang untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja.

4. Faktor Demografis

Faktor demografis, seperti usia, jenis kelamin, dan status perkawinan, juga mempengaruhi partisipasi angkatan kerja. Sebagai contoh, kelompok usia tertentu mungkin menunjukkan tingkat partisipasi yang berbeda, sementara status perkawinan dapat memengaruhi tanggung jawab keluarga serta motivasi untuk bekerja.

2.2.4 Kriminalitas

Kriminalitas adalah fenomena di mana individu melakukan tindakan atau perilaku yang melanggar aturan dan hukum yang berlaku di masyarakat, dan dapat dikenakan hukuman oleh sistem peradilan. Menurut Saputra (2023), konsep kriminalitas mencakup berbagai bentuk pelanggaran, dari kejahatan ringan hingga kejahatan serius, dan dapat dipahami melalui berbagai teori yang menjelaskan sebab-sebab dan dinamika di balik terjadinya kejahatan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas

1. Faktor Sosial dan Ekonomi

Aspek sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan kondisi hidup yang tidak memadai dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas. Kesulitan ekonomi dan ketidakstabilan sosial sering kali menciptakan situasi yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk upaya bertahan hidup atau untuk memperoleh keuntungan.

2. Faktor Lingkungan dan Komunitas

Kondisi lingkungan dan komunitas tempat tinggal juga memengaruhi tingkat kriminalitas. Kawasan dengan pengawasan sosial yang minim, fasilitas umum yang terbatas, dan keberadaan kelompok kriminal cenderung meningkatkan kemungkinan individu terlibat dalam perilaku kriminal.

3. Faktor Individu

Faktor-faktor individu seperti usia, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan kondisi mental dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan. Contohnya, remaja dan mereka yang berasal dari keluarga dengan riwayat kriminal mungkin lebih berisiko terlibat dalam tindakan kriminal.

Indikator Kriminalitas

Badan Pusat Statistik menggolongkan indikator kriminalitas yang digunakan untuk mengukur kejahatan sebagai berikut :

1. Angka Jumlah Kejahatan (*Crime Total*)

Pengukuran indeks kejahatan (*It*) adalah persentase kenaikan atau penurunan kejahatan dalam periode satu tahun dibandingkan dengan satu tahun tertentu (yang dijadikan tahun dasar). Rumus menentukan indeks kejahatan :

$$It = \frac{\text{jumlah kejahatan pada tahun } t}{\text{jumlah kejahatan pada tahun } t_0} \times 100\%$$

Keterangan : t = Tahun t

t_0 = Tahun dasar

2. Selang Waktu Terjadinya Suatu Tindakan (*Crime Clock*)

Crime clock merupakan interval waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan kejahatan yang lain. Selang waktu terjadinya kriminal dinyatakan dalam satuan waktu detik.

$$365 \text{ (hari)} \times 24 \text{ (jam)} \times 60 \text{ (menit)} \div \text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun } t \times \text{detik}$$

3. Jumlah Orang yang Berisiko Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)

$$\frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

2.2.5 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk mengacu pada jumlah penduduk yang tinggal di area tertentu, dan biasanya diukur dalam jumlah orang per unit luas, seperti per kilometer persegi. Menurut Sari (2022), ukuran ini menggambarkan tingkat kepadatan atau kelangkaan penduduk di suatu wilayah, serta dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan sosial, dan standar hidup.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), kepadatan penduduk diukur sebagai rasio antara jumlah total penduduk dengan luas area, yang dinyatakan dalam kilometer persegi. BPS secara rutin mengumpulkan dan melaporkan data tentang kepadatan penduduk melalui sensus dan survei yang dilakukan secara berkala. Data ini sangat penting untuk merencanakan pembangunan, mengalokasikan sumber daya, dan merumuskan kebijakan pemerintah.

BPS mengelompokkan kepadatan penduduk ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan angka kepadatan yang diukur. Sebagai contoh, wilayah dengan kepadatan lebih dari 1.000 orang per kilometer persegi dikategorikan sebagai kepadatan tinggi, sementara wilayah dengan kepadatan kurang dari 100 orang per kilometer persegi dikategorikan sebagai kepadatan rendah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepadatan Penduduk

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap pola kepadatan penduduk. Daerah dengan banyak peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi yang pesat cenderung menarik migrasi dan menunjukkan kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Sebaliknya, wilayah dengan sedikit kesempatan ekonomi sering kali memiliki tingkat kepadatan yang lebih rendah.

2. Faktor Sosial

Aspek sosial seperti tingkat pendidikan, akses kesehatan, dan standar hidup berperan dalam menentukan distribusi serta kepadatan penduduk. Wilayah yang menawarkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas cenderung memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi, karena menarik lebih banyak orang untuk tinggal dan bekerja di area tersebut.

3. Faktor Infrastruktur

Kualitas dan ketersediaan infrastruktur seperti sarana transportasi, perumahan, dan layanan publik juga memengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Daerah dengan infrastruktur yang memadai sering kali memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi, sementara daerah dengan infrastruktur yang kurang berkembang biasanya menunjukkan kepadatan yang lebih rendah.

4. Faktor Lingkungan

Faktor-faktor lingkungan seperti ketersediaan lahan dan kondisi geografis berkontribusi pada pola kepadatan penduduk. Wilayah yang memiliki lahan subur dan akses ke sumber daya alam umumnya memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi, sedangkan daerah dengan kondisi geografis yang tidak mendukung atau kurang ideal mungkin mengalami kepadatan yang lebih rendah.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan

Ardhana, (2024) mengemukakan bahwa intervensi pemerintah diperlukan karena adanya masalah pembangunan yang sedang berlangsung. Diharapkan dengan adanya intervensi ini, masalah kemiskinan dapat diatasi. Intervensi pemerintah tersebut melibatkan pengeluaran negara, yang merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal selain pajak. Tujuan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah sangat mempengaruhi besaran pengeluaran. Tujuan ekonomi ini mencakup pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pencegahan inflasi, dan percepatan pembangunan ekonomi jangka panjang. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah, yang bersumber dari anggaran yang dibiayai oleh pajak, bertujuan untuk membangun infrastruktur publik serta memberikan bantuan langsung dengan sasaran mengurangi kemiskinan dan mencapai kesetaraan pendapatan. Dengan demikian, alat kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah diharapkan dapat membantu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kemiskinan.

2.3.2 Hubungan Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan

Sadono Sukirno dalam (Sembiring et al., 2020) menjelaskan bahwa dampak negatif dari TPAK adalah dapat mengurangi pendapatan masyarakat dan akhirnya menurunkan tingkat

kesejahteraan yang telah dicapai. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja menyebabkan persaingan antar masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan sehingga sebagian masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan dapat meningkatkan kemiskinan karena kurangnya pendapatan. Jika TPAK sangat tinggi, sering kali akan muncul ketidakstabilan politik dan sosial, yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

2.3.3 Hubungan Kriminalitas Terhadap Kemiskinan

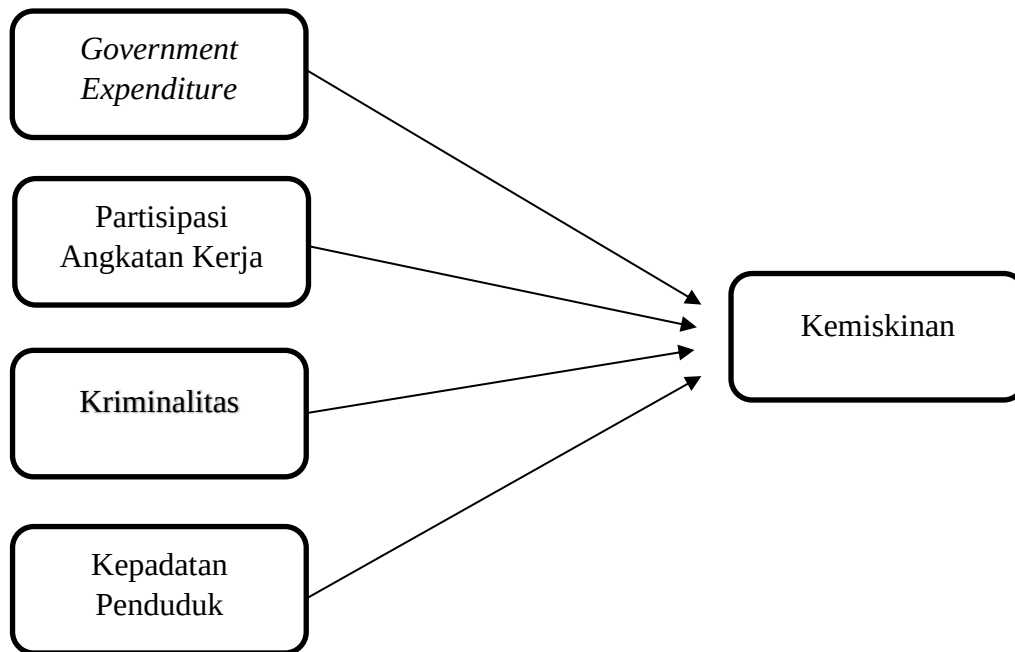
Kuciswara et al., (2021) menjelaskan bahwa kriminalitas dapat memperburuk kemiskinan dengan menurunkan kesejahteraan ekonomi individu dan keluarga akibat kerugian finansial dari tindakan kejahatan seperti pencurian atau perampokan. Selain itu, tingkat kriminalitas yang tinggi dapat meningkatkan biaya hidup karena kebutuhan untuk pengeluaran tambahan pada sistem keamanan, yang semakin membebani ekonomi, terutama bagi mereka yang sudah berada dalam kondisi miskin. Kriminalitas juga dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesempatan kerja, dan memperburuk kemiskinan. Ketidakstabilan sosial yang disebabkan oleh kriminalitas dapat merusak lingkungan yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya memperburuk kemiskinan dalam jangka panjang. Tingginya angka kriminalitas suatu daerah dapat mempengaruhi investasi yang masuk ke daerah tersebut karena menimbulkan rasa tidak aman dan dapat menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi sehingga angka kemiskinan akan meningkat.

2.3.4 Hubungan Kepadatan Penduduk Terhadap Kemiskinan

Kuciswara et al., (2021) mengemukakan bahwa kepadatan penduduk yang tinggi seringkali menambah tekanan pada sumber daya dan infrastruktur, seperti perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan, yang dapat memperburuk persaingan untuk pekerjaan dan sumber daya terbatas. Ini pada gilirannya dapat meningkatkan biaya hidup dan menurunkan kualitas hidup. Jika infrastruktur dan layanan publik tidak mampu memenuhi kebutuhan populasi yang besar, risiko kemiskinan meningkat karena individu atau keluarga mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke peluang ekonomi dan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, kepadatan penduduk yang tinggi sering dihubungkan dengan masalah seperti kemacetan, polusi, dan isu lingkungan lainnya, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi dan kualitas hidup penduduk, meningkatkan tingkat kemiskinan di area tersebut.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah suatu struktur atau model konseptual yang membantu mengorganisasi, menganalisis, dan memahami suatu masalah atau fenomena tertentu. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam proses penelitian atau penyusunan argumen, dengan tujuan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan logis, sistematis, dan terstruktur.



2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam penelitian sehingga keberadaannya perlu dibuktikan. Hipotesis dapat terbentuk dari jawaban sementara rumusan masalah dalam penelitian. Adapun hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini adalah:

- Secara parsial diduga Belanja Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012-2022
- Secara parsial diduga Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012-2022
- Secara parsial diduga Kriminalitas berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012-2022
- Secara parsial diduga Kepadatan Penduduk berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012-2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan yang terstruktur, terencana, dan sistematis. Data yang digunakan adalah data panel, yaitu kombinasi antara data *time series* dan data *cross-section*, yang diambil dari Badan Pusat Statistik. Data ini mencakup periode 2012-2022 di Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana variabel dependen, yaitu kemiskinan, dipengaruhi oleh variabel independen seperti belanja pemerintah, partisipasi angkatan kerja, kriminalitas dan kepadatan penduduk. Selain data dari BPS, penelitian ini juga memanfaatkan sumber dari jurnal, skripsi, dan studi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini memiliki dua variable utama, yaitu variable dependen dan variable independent. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan. Sedangkan variable independent yang digunakan adalah belanja pemerintah, partisipasi angkatan kerja, kriminalitas dan kepadatan penduduk.

Variabel	Keterangan	Satuan
Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa
Belanja Pemerintah	Realisasi Belanja Pemerintah	Milyar
Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen
Kriminalitas	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Kasus
Kepadatan Penduduk	Jumlah Penduduk	Jiwa per km2

3.3 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel, yang mengintegrasikan data *cross-section* dengan data *time series*. Data *cross-section* terdiri dari kumpulan data dari sampel tertentu, sementara data *time series* mencakup kumpulan data yang diukur pada interval waktu tertentu. Dalam penelitian ini, penulis mengaplikasikan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) untuk mengestimasi data panel. Analisis ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *E-views* 12.

3.4 Metode Regresi Data Panel

$$Kemiskinan_{it} = \beta_0 + \beta_1 Belanja\ Pemerintah_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + \beta_3 Kriminalitas_{it} + \beta_4 \\ \text{Kepadatan Penduduk}_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

Kemiskinan	: Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)
Belanja Pemerintah	: Realisasi Pengeluaran Pemerintah (Milyar)
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)
Kriminalitas	: Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (Kasus)
Kepadatan Penduduk	: Tingkat Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km ²)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	: Koefisien
β_0	: Koefisien Intersep
i	: <i>Cross Section</i> (14 Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat)
t	: <i>Time Series</i> (Tahun 2012-2022)
e	: Residual

3.5 Metode Estimasi

1. *Common Effect Model*

Common Effect Model adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data yang melibatkan beberapa individu yang diamati pada berbagai waktu. Model ini berasumsi bahwa efek individu dan waktu bersifat konstan dan seragam di seluruh observasi. Dengan kata

lain, *Common Effect Model* tidak memperhitungkan variasi antara individu atau variasi dalam waktu, sehingga menghasilkan koefisien regresi yang seragam untuk semua individu dan periode waktu. Di bawah ini merupakan model persamaannya :

$$Kemiskinan_{it} = \beta_0 + \beta_1 Belanja Pemerintah_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + \beta_3 Kriminalitas_{it} + \beta_4 \\ Kepadatan Penduduk_{it} + e_{it}$$

2. *Random Model Effect*

Random Model Effect berasumsi bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam intersep, yang dianggap sebagai variabel acak. Model ini cocok digunakan ketika sampel individu dipilih secara acak untuk mewakili keseluruhan populasi. Selain itu, metode ini juga memperhitungkan kemungkinan adanya korelasi error antara data *cross section* dan *time series*. Di bawah ini merupakan model persamaannya :

$$Kemiskinan_{it} = \beta_0 + \beta_1 Belanja Pemerintah_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + \beta_3 Kriminalitas_{it} + \beta_4 \\ Kepadatan Penduduk_{it} + a_i D_i + e_{it}$$

$D = Dummy$

3. *Fixed Effect Model*

Fixed Effect Model berasumsi bahwa setiap individu memiliki intersep yang berbeda-beda, sementara koefisien regresi (slope) tetap konsisten di antara individu. Model ini menggunakan variabel *dummy* untuk mengidentifikasi perbedaan intersep di antara individu. Di bawah ini merupakan model persamaannya :

$$Kemiskinan_{it} = \beta_0 + \beta_1 Belanja Pemerintah_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + \beta_3 Kriminalitas_{it} + \beta_4 \\ Kepadatan Penduduk_{it} + a_i D_i + e_{it}$$

$D = Dummy$

3.6 Menentukan Model Estimasi

Penelitian ini akan menentukan model terbaik melalui langkah-langkah estimasi. Firmansyah et al. (2022) menjelaskan bahwa ada tiga uji yang dilakukan :1) *Uji Chow*, yang digunakan untuk mengevaluasi apakah *Fixed Effects* atau *Common Effects* merupakan model regresi terbaik. 2) *Uji Hausman*, yang berfungsi untuk membandingkan antara *Random Effects*

Model dan *Fixed Effects Model* guna memilih model regresi yang paling tepat. 3) *Uji Lagrange Multiplier*, yang digunakan untuk menentukan apakah *Model Random Effects* atau *Model Fixed Effects* adalah yang terbaik untuk hasil regresi.

3.6.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih antara *Fixed Effects Model* atau *Common Effects Model* sebagai model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini.

H₀: *Common Effects* adalah model terbaik.

H_a: *Fixed Effects* adalah model terbaik.

Dalam penelitian ini, asumsi awal adalah untuk memilih model terbaik antara *Common Effects Model* dan *Fixed Effects Model*. Berdasarkan hasil uji, jika nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha=0,05$, maka menolak H₀ dan disimpulkan bahwa *Fixed Effects Model* adalah model yang paling tepat. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha=0,05$, maka gagal menolak H₀, sehingga disimpulkan bahwa *Common Effects Model* adalah model yang lebih sesuai.

3.6.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara *Fixed Effects Model* atau *Random Effects Model* sebagai model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini.

H₀: *Random Effects* adalah model terbaik.

H_a: *Fixed Effects* adalah model yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, asumsi awal adalah memilih model terbaik antara *Random Effects Model* dan *Fixed Effects Model*. Jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas kurang dari $\alpha=0,05$, maka menolak H₀ dan disimpulkan bahwa *Fixed Effects Model* adalah model yang paling sesuai. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha=0,05$, maka gagal menolak H₀, sehingga disimpulkan bahwa *Random Effects Model* adalah model yang lebih tepat.

3.6.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*) digunakan untuk memilih antara *Common Effects Model* atau *Random effect model* sebagai model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini

H_0 : *Common Effects* adalah model terbaik.

H_a : *Random Effects* adalah model yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, asumsi awal adalah untuk memilih model terbaik antara *Common Effects Model* dan *Random Effects Model*. Jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas kurang dari $\alpha=0,05$, maka menolak H_0 dan disimpulkan bahwa *Common Effects Model* adalah model yang paling sesuai. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha=0,05$, maka gagal menolak H_0 , sehingga disimpulkan bahwa *Random Effects Model* adalah model yang lebih tepat.

3.7 Uji Statistik

Tujuan dari uji statistik adalah untuk membuat keputusan berdasarkan data sampel. Melalui uji statistik, kita dapat menentukan apakah hasil penelitian secara signifikan berbeda dari atau sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.7.1 Koefisien Determinasi - R^2 / *R square*

Koefisien determinasi, atau yang sering dikenal sebagai R-square, adalah ukuran statistik yang menggambarkan proporsi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilainya berkisar antara 0 dan 1; jika R-square = 1, maka model regresi menjelaskan 100% variabilitas data, menunjukkan model yang sangat baik. Sebaliknya, jika R-square = 0, model regresi tidak menjelaskan variabilitas data sama sekali, menandakan model yang sangat buruk. Semakin tinggi nilai R-square, semakin efektif model regresi dalam menjelaskan variabilitas data, sementara semakin rendah nilai R-square, semakin kurang efektif model dalam menjelaskan variabilitas data.

3.7.2 Uji Simultan – Uji F

Tujuan dilakukan Uji F adalah untuk mengetahui seberapa besar variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Hipotesis dalam Uji F :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

Artinya, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$$

Artinya, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

3.7.3 Uji Parameter Individual – Uji T

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual, berbeda dengan Uji F yang menguji pengaruh secara simultan atau bersama-sama.

Hipotesis dalam Uji T :

1. Pengaruh belanja pemerintah terhadap kemiskinan

$H_0: \beta_1 \geq 0$ (tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel belanja pemerintah dan variabel kemiskinan)

$H_a : \beta_1 < 0$ (terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel belanja pemerintah dan variabel kemiskinan)

2. Pengaruh partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan

$H_0: \beta_1 \geq 0$ (tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel TPAK dan variabel kemiskinan)

$H_a : \beta_1 < 0$ (terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel TPAK dan variabel kemiskinan)

3. Pengaruh kriminalitas terhadap kemiskinan

$H_0: \beta_1 \geq 0$ (tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kriminalitas dan variabel kemiskinan)

$H_a : \beta_1 < 0$ (terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kriminalitas dan variabel kemiskinan)

4. Pengaruh kepadatan penduduk terhadap kemiskinan

$H_0: \beta_1 \geq 0$ (tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kepadatan penduduk dan variabel kemiskinan)

$H_a : \beta_1 < 0$ (terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kepadatan penduduk dan variabel kemiskinan)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Menggunakan pendekatan model data panel. Data yang dianalisis adalah data sekunder yang menggabungkan informasi dari berbagai sektor dan rentang waktu di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2012 hingga 2022. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik. Variabel independen yang dimasukkan dalam penelitian ini meliputi Belanja Pemerintah, Partisipasi Angkatan Kerja, Kriminalitas dan Kepadatan Penduduk.

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pengaruh variabel-variabel independen, seperti Belanja Pemerintah yang diukur dengan realisasi belanja pemerintah, Partisipasi Angkatan Kerja yang diukur dengan jumlah angkatan kerja, Kriminalitas yang diukur dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan dan Kepadatan Penduduk yang diukur dengan tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Barat antara tahun 2012-2022 menggunakan metode analisis data panel dengan bantuan perangkat lunak *Eviews 12*. Deskripsi statistik dalam penelitian ini mencakup perhitungan nilai rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal, dan deviasi standar untuk setiap variabel yang diteliti, yang akan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Hasil Uji Deskriptif

	Kemiskinan	BP	TPAK	Kriminalitas	KP
Mean	27.44829	1.21E+09	172918.7	231.9500	529.7500
Median	24.34500	1.10E+09	146652.5	198.0000	37.00000
Max	58.80000	2.35E+09	337068.0	744.000	6213.000
Min	10.23000	792645.0	50736.00	44.00000	8.000000
Std. Dev	13.97504	4.52E+08	72020.45	140.8564	1550.937
Observ	140	140	140	140	140

Berdasarkan table 4.1, diketahui bahwa setiap variabel memiliki jumlah data sebanyak 140, yang berasal dari 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012-2022. Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin memiliki nilai minimum yaitu 10,23 ribu

jiwa dan nilai maksimumnya sebanyak 58,8 ribu jiwa dengan nilai rata-rata sebesar 27,4 ribu jiwa dan standar deviasi sebesar 13,9 ribu jiwa. Variabel Belanja Pemerintah memiliki nilai minimum sebesar 792.645 rupiah dan nilai maksimum sebesar 2,3 milyar rupiah, nilai tersebut memiliki arti bahwa realisasi belanja pemerintah di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat berkisar antara 792.645 rupiah hingga 2,3 milyar rupiah dengan nilai rata-rata sebesar 1,2 milyar rupiah dan standar deviasi sebesar 4,5 milyar rupiah. Kemudian, Partisipasi Angkatan Kerja memiliki nilai minimum sebesar 50.736 jiwa dan nilai maksimumnya sebesar 337.068 jiwa, nilai tersebut memiliki arti bahwa tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat berkisar antara 45.248 hingga 337.068 jiwa dengan nilai rata-rata sebesar 172.918 jiwa dan standar deviasi sebesar 72.020 jiwa.

Selanjutnya variabel Kriminalitas memiliki nilai minimum sebesar 44 kasus dan nilai maksimum sebesar 744 kasus, nilai tersebut memiliki arti bahwa tingkat Kriminalitas di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat berkisar antara 44 hingga 744 kasus dengan nilai rata-rata sebesar 231 kasus dan standar deviasi sebesar 140 kasus. Lalu, Kepadatan Penduduk memiliki nilai minimum sebesar 8 jiwa per km² dan nilai maksimum sebesar 6.213 jiwa per km², nilai tersebut memiliki arti bahwa Kepadatan Penduduk di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat berkisar antara 8 hingga 6.213 jiwa per km² dengan nilai rata-rata sebesar 529,7 jiwa per km² dan standar deviasi sebesar 1550,9 jiwa per km².

4.2 Hasil dan Pembahasan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa uji yang dipilih adalah common effect. hasil penelitian yang diperoleh dari hasil analisis data akan disajikan secara sistematis. Pembahasan akan di fokuskan pada interpretasi hasil dan di bandingkan dengan teori dan penelitian sebelumnya.

Tabel 4.2 Hasil Pengujian CE, FE, RE

Variable	CE		FE		RE	
	Coeficient	prob	Coeficient	prob	Coeficient	prob
C	-2.934164	0.1963	-5.502354	0.0222	-2.934164	0.1889
BP	9.11E-09	0.0005	1.46E-08	0.0000	9.11E-09	0.0004
TPAK	7.75E-05	0.0002	6.90E-05	0.0013	7.75E-05	0.0001

KRIMINALITAS	0.029036	0.0000	0.017722	0.0293	0.029036	0.0000
KP	0.001458	0.0158	0.00415	0.0206	0.001458	0.0142
R-SQUARE	0.615550		0.663926		0.615550	
F-stat	54.03765		14.17740		54.03765	
Prob F-Stat	0.000000		0.00000		0.000000	

4.3 Uji Pemilihan Model

1. Uji Chow

Untuk mengetahui model mana yang terbaik antara *common effect model* atau *fixed effect model* maka perlu dilakukan uji chow. Apabila nilai probabilitas cross-section F lebih besar ($>$) dari 0.05 artinya model yang dipilih adalah *common effect model* sedangkan apabila nilai probabilitas cross-section F lebih kecil ($<$) dari 0.05 artinya model yang dipilih adalah *fixed effect model*.

Hipotesis yang dibentuk adalah :

H_0 : *Common effect model* lebih baik

H_a : *Fixed effect model* lebih baik

Tabel 4.3 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-Section F	1.350890	(13,122)	0.1934
Cross-Section Chi-Square	18.827869	13	0.1285

Dapat dilihat pada tabel di atas didapatkan hasil bahwa nilai statistik cross-section F adalah 1.350890 dengan nilai probabilitas $0.1934 > 0.05$, maka dapat disimpulkan berdasarkan *Uji Chow* hasilnya gagal menolak H_0 . Sehingga model yang terpilih adalah *Common Effect*.

2). Uji Hausman

Untuk mengetahui model mana yang terbaik antara *common effect model* atau *fixed effect model* maka perlu di lakukan *uji hausman*. Apabila nilai probabilitas cross-section F lebih besar ($>$) dari 0.05 artinya model yang dipilih adalah random effect sedangkan apabila nilai probabilitas cross-section F lebih kecil ($<$) dari 0.05 artinya model yang dipilih adalah fixed effect.

Hipotesis yang di bentuk adalah :

H_0 : *Random effect model* lebih baik

H_a : *Fixed effect model* lebih baik

Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Probabilitas
Cross-section Random	9.645971	4	0.0468

Dapat dilihat pada tabel di atas di dapatkan hasil bahwa nilai distribusi statistic *Chi-Square* adalah 9.645971 dan nilai probabilitas yang di dapatkan adalah $0.0468 < 0.05$, sehingga keputusannya adalah menolak H_0 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect*.

3). Uji Lagrange Multiplier

Untuk mengetahui model mana yang terbaik antara *common effect model* atau *random effect model* maka perlu di lakukan *uji lagrange multiplier*. Apabila nilai probabilitas cross-section *Breuch-Pagan* lebih besar ($>$) dari 0.05 artinya model yang dipilih adalah *common effect* sedangkan apabila nilai probabilitas cross-section *Breuch-Pagan* lebih kecil ($<$) dari 0.05 artinya model yang dipilih adalah *random effect*.

Hipotesis yang di bentuk adalah :

H_0 : *Common effect model* lebih baik

H_a : *Random effect model* lebih baik

Tabel 4.5 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Test Hypothesis			
	Cross-section	Time	Both
Breuch-Pagan	0.000612 (0.9803)	5.040841 (0.0248)	5.041453 (0.0247)
Honda	-0.024734 (0.5099)	-2.245182 (0.9876)	-1.605073 (0.9458)
King-Wu	-0.024734 (0.5099)	-2.245182 (0.9876)	-1.7.03289 (0.9557)
Standardized Honda	0.249232 (0.4016)	-2.138928 (0.9838)	-5.415538 (1.0000)
Standardized King-Wu	0.249232 (0.4016)	-2.138928 (0.9838)	-5.488584 (1.0000)
Gourieroux, et al	--	--	0.000000 (1.0000)

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa didapatkan nilai probabilitas cross section Breuch-Pagan sebesar $0.9803 > 0.05$, keputusan yang di buat dari hasil ini adalah gagal menolak H_0 . Sehingga model yang terpilih adalah *common effect*.

Berdasarkan hasil uji pemilihan model regresi, ditemukan bahwa dari 3 uji yang dilakukan :

1. Uji Chow : Memilih *Common Effect* sebagai model terbaik
2. Uji Hausman : Memilih *Fixed Effect* sebagai model terbaik
3. Uji LM : Memilih *Common Effect* sebagai model terbaik

Didapatkan Kesimpulan bahwa dari 3 uji yang dilakukan, 2 diantaranya memilih *Common Effect* sebagai model terbaik, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan hasil regresi *Common Effect*.

4.4 Estimasi Common Effect Model

Hasil estimasi menunjukkan bahwa model yang dipilih adalah *Common Effect Model* yang merupakan model terbaik dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antara variabel independent dan dependen.

Tabel 4.6 Hasil *Common Effect*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-2.934164	2.259363	-1.298669	0.1963
BELANJAPEMERINTAH	9.11E-09	2.54E-09	3.582955	0.0005
TPAK	7.75E-05	2.01E-05	3.850171	0.0002
KRIMINALITAS	0.029036	0.006402	4.535270	0.000
KEPADATANPENDUDUK	0.001458	0.000597	2.444138	0.0158
R-squared	0.615550			
Adjust R-squared	0.604158			
F-Statistic	54.03765			
Prob F-statistic	0.000000			

Persamaan regresi data panel :

$$Y = -2.934164 + 9.11E-09 (BP) + 7.75E-05 (TPAK) + 0.029036 (KRIMINALITAS) + 0.001458 (KP)$$

4.5 Koefisien Determinasi / R-Square (R²)

Fungsi koefisien determinasi adalah untuk mengukur seberapa baik variabel independen mampu menjelaskan variabilitas dari variabel dependen, yang ditunjukkan dengan nilai R-square. Dari hasil estimasi didapatkan bahwa nilai R-square sebesar 0.615550 atau 61,55%. Artinya variabel Belanja Pemerintah, Partisipasi Angkatan Kerja, Kriminalitas dan Kepadatan Penduduk mampu menjelaskan tingkat Kemiskinan sebesar 61,55%, sedangkan sisanya sebesar 38,45% di jelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

4.6 Uji F (Uji Simultan)

Berdasarkan hasil Uji F pada model terpilih di dapatkan bahwa nilai F-statistik sebesar 54.03765 dan probabilitasnya adalah 0.00000, nilai ini lebih kecil ($<$) dari nilai alpha 0.05, maka keputusan nya adalah menolak H_0 . Sehingga dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan atau bersama sama variabel Belanja Pemerintah, Partisipasi Angkatan Kerja, Kriminalitas dan Kepadatan Penduduk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat dalam rentang tahun 2012-2022.

4.7 Uji T (Uji Individual)

a). Belanja Pemerintah

Berdasarkan tabel 4.6 didapatkan bahwa nilai koefisien dari variabel belanja pemerintah adalah $9.11E-09$ dengan nilai probabilitasnya sebesar $0.0005 < 0.05$, artinya Belanja Pemerintah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap Kemiskinan. Akan tetapi tidak sesuai dengan hipotesis.

b). Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan tabel 4.6 didapatkan bahwa nilai koefisien dari variabel partisipasi angkatan kerja adalah $7.75E-05$ dengan nilai probabilitasnya sebesar $0.0002 < 0.05$, artinya Partisipasi Angkatan Kerja memberikan pengaruh positif signifikan terhadap Kemiskinan. Akan tetapi tidak sesuai dengan hipotesis.

c). Kriminalitas

Berdasarkan tabel 4.6 didapatkan bahwa nilai koefisien dari variabel kriminalitas adalah 0.029036 dengan nilai probabilitasnya sebesar $0.0000 < 0.05$, artinya Kriminalitas memberikan pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Sehingga, sesuai dengan hipotesis.

d). Kepadatan Penduduk

Berdasarkan tabel 4.6 didapatkan bahwa nilai koefisien dari variabel kepadatan penduduk adalah 0.001458 dengan nilai probabilitasnya sebesar $0.0158 < 0.05$, artinya Kepadatan Penduduk memberikan pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Sehingga, sesuai dengan hipotesis.

4.8 Pembahasan

a). Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil regresi, didapatkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0005. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Jika belanja pemerintah meningkat sebesar 1 milyar, maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 9,11 ribu jiwa. Hasil ini sesuai dengan penelitian Evita & Primandhana (2022) yang mendapatkan hasil bahwa Belanja Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kemiskinan. Jika belanja pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk proyek infrastruktur atau sektor yang tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, maka manfaatnya bisa terabaikan bagi kelompok rentan.

b). Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil regresi, didapatkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0002 yang dimana nilai ini lebih kecil ($<$) dari nilai alpha 0.05 dan nilai koefisiennya sebesar $7.75E-05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Angkatan Kerja memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kemiskinan. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 7,75 ribu jiwa. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ashari & Athoillah (2023) yang menyatakan partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dengan meningkatnya TPAK, terdapat banyak daya saing sehingga lebih banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang mengakibatkan penurunan pendapatan. Keluarga yang kehilangan sumber penghasilan utama akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan.

c). Pengaruh Kriminalitas terhadap Kemiskinan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil regresi, didapatkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang dimana nilai ini lebih kecil ($<$) dari nilai alpha 0.05 dan nilai koefisiennya sebesar 0.029036. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Kriminalitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kemiskinan. Jika kriminalitas meningkat sebesar 1 kasus maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,02 ribu jiwa. Hasil ini sesuai dengan penelitian Maarif (2022) yang menyatakan bahwa kriminalitas memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Tingginya angka kriminalitas suatu daerah dapat mempengaruhi investasi yang masuk ke daerah tersebut

karena menimbulkan rasa tidak aman dan dapat menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi sehingga angka kemiskinan akan meningkat.

d). Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Kemiskinan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil regresi, didapatkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0158 yang dimana nilai ini lebih kecil ($<$) dari nilai alpha 0.05 dan nilai koefisiennya sebesar 0.001458. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Kepadatan Penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemiskinan. Jika kepadatan penduduk meningkat sebesar 1 jiwa maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,001458 ribu jiwa. Hasil ini sesuai dengan penelitian Mita & Usman (2018) yang menyatakan bahwa kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi semakin ketat. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan, sementara banyak pula yang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Akibatnya, sebagian besar orang terjebak dalam kemiskinan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini mendapatkan kesimpulan sebagai berikut bahwa semua variabel independent; Belanja Pemerintah, Partisipasi Angkatan Kerja, Kriminalitas dan Kepadatan Penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Akan Tetapi, variabel Belanja Pemerintah dan Partisipasi Angkatan Kerja tidak sesuai dengan hipotesis.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.2 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini mendapatkan implikasi kebijakan sebagai berikut :

1. Alokasi terhadap belanja pemerintah lebih banyak di berikan atau dialokasikan pada program sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial untuk keluarga miskin, dan program jaminan sosial lainnya.
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat ditingkatkan pada akses pendidikan dan pelatihan keterampilan dengan memperkenalkan program pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
3. Peningkatan keamanan seperti, patroli polisi dan keberadaan aparat keamanan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan juga memberikan pelatihan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan ketidakadilan sosial.
4. Pengembangan ekonomi di daerah perdesaan melalui pemberdayaan petani, pengembangan industri berbasis lokal, dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan juga menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pembangunan yang lebih baik, agar tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, S. El. (2020). *Kemiskinan Dan Penyebabnya Faktor-Faktor Penyebabnya*. 1(April), 43–50.
- Agus Triono, T., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 59–67. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5>
- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 265–283.
- Aisyaturridho. (2019). Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Angka Harapan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara Periode 2011-2016. *Hilos Tensados*, 1, 1–476.
- Anggun, & Sari, N. I. (2024). Pengaruh Realisasi Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2022. *Ekodestinas*, 2(1), 17–35. <https://doi.org/10.59996/ekodestinas.v2i1.406>
- Ardhana, F. (2024). *ANALISIS PENGARUH PDRB, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG*. 19(5), 1–23.
- Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis Pengaruh TPT, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Tapal Kuda. *Journal Of Development and Social Studies*, 2(2), 313–326.
- Asynur, A. T. (2023). *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2017-2021*.
- Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan Ipm Dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Info Artha*, 2(1), 11–28. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.235>
- Dimas Lutfi Adhi N. (2019). Analisis Pengaruh Pdrb, Ipm, Tingkat Pengangguran Dan

- Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2017. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*
- Edna Safitri, S., Triwahyuningtyas, N., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(4), 259–274.* <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.30>
- Emilia Khristina Kiha, Sirilius Seran, H. T. L. (2021). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN, DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN BELU. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2(07), 60–84.*
- Evita, M. J., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Pemerintah Terhadap kemiskinan Di Kabupaten Blora. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 10(S1), 79–88.*
- Fadillah, A. (2021). MACRO ECONOMY AND POVERTY REDUCTION IN INDONESIA (Analysis of Economic Growth Capability and Macroeconomic Indicators in PovertyReduction in Indonesia). *Islamic Science, Culture, and Social Studies, 1(2), 186–203.* <https://doi.org/10.53754/iscs>
- Fadillah, N., & Sabar, W. (2023). Efek Belanja Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran, dan Kemiskinan di Kabupaten Gowa. *Bulletin of Economic Studies (BEST), 3(1 SE-), 25–37.* <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/best/article/view/35390>
- Hatta, M. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada bidang Pendidikan Dan Bidang Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Wilayah Ajatappareng. *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1(3), 39.*
- Hazeng, P., Sugianto, F., & Michael, T. (2021). Telaah Profiling Subjek Huukum Yang Terkait Tindak Pidana Kriminalitas. *Jurnal Penelitian Hukum, 1(02), 1–11.* <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/5>
- Kamila, N. R., Mulyana Aulia, T., Rusdi Ilham, M., Fauzan, M. A., & Ribawati, E. (2023). KEMISKINAN DAN KRIMINALITAS Nida. *Cendekia Pendidikan, 2(5), 10–20.* <https://ejournal.warunayama.org/index.php/sindorocendikiapendidikan/article/view/769>

- Khamilah, H. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 314–324.
<https://doi.org/10.20527/jiep.v1i2.1140>
- Kuciswara, D., Muslihatinningsih, F., & Santoso, E. (2021). Pengaruh urbanisasi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(3), 1–9. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16307>
- Leli Safitri, & Effendi, M. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Penduduk dan Investasi terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan. *Ayan*, 8(5), 55.
- Lestari, N. N. S. A., Bagia, I. W., & Jana, G. P. A. S. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), 24–33.
- Maarif, M. R. (2022). ANALISIS PENGARUH KRIMINALITAS, ANGGARAN PENDIDIKAN, DAN KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI 9 KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 – 2018. In *Feb, UIN Syarif Hidayatullah* (Vol. 5, Issue 3).
- Murialti, N., & Romanda, R. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Propinsi Bengkulu (2010-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 109–118.
<https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1976>
- Nur Azizah, S. P., Pratiwi, L. S., Amaliah, I., & Fitriyana, F. (2022). Sanitasi Dan Kepadatan Penduduk Sebagai Dinamika Kemiskinan Kota Studi Kasus Provinsi Jawa Barat. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(1), 55–70.
<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1148>
- Palayukan, M. (2019). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(2), 74–91. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i2.376>
- Putriana, R., & Aji, R. H. S. (2022). Studi Atas Kemiskinan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Rata-Rata Lama Sekolah Sebagai Penentu Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi D.I Yogyakarta. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8, 31–47.

- Ramadhan, B. A., & Setyowati, E. (2023). Analisis Pengaruh Populasi Penduduk, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Banten Tahun 2017-2021. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(3), 82–89. <https://doi.org/10.31253/pe.v21i3.2065>
- Sabiq, R. M., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Tindakan Kriminal. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 161. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i2.35149>
- Safitri, M. I. D., Candra Fajri Ananda, & Ferry Prasetyia. (2021). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85–96. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339>
- Safuridar, & Putri, N. I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Jumlah Penduduk 34. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 1–13.
- Saputra, R. (2023). Analisis Tingkat Pendidikan, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Bekasi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 3(4), 159–163.
- Sari, N. L. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2002-2021. *Jurnal Ekonmi Dan Bisnis*, 11(1), 567–574.
- Sembiring, F., Tarmizi, T., & Rujiman, R. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Serambi Engineering*, 5(2). <https://doi.org/10.32672/jse.v5i2.1925>
- Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1171–1181.
- Syawal Ibraya, N., Mukramin, S., & Azis, F. (2023). Penanggulangan Kriminalitas di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab.Takalar. *TOBA (Journal of Tourism, Hospitality and Destination)*, 2(2), 24–29. <https://doi.org/10.55123/toba.v2i2.2259>
- Tri Darmawanto, A. (2023). Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan. *Syntax Idea*, 5(12), 2335–2354.

Wahyuni, C., & Anis, A. (2019). Pengaruh Investasi Luar Negeri, Pendidikan Dan Teknologi Informasi-Komunikasi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 897.
<https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7716>

LAMPIRAN

FIXED EFFECT

Dependent Variable: KEMISKINAN
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/23/24 Time: 08:10
 Sample: 2012 2022
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 14
 Total panel (unbalanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.502354	2.376008	-2.315797	0.0222
BELANJAPEMERINTAH	1.46E-08	3.18E-09	4.596951	0.0000
TPAK	6.90E-05	2.09E-05	3.296268	0.0013
KRIMINALITAS	0.017722	0.008035	2.205521	0.0293
KEPADATANPENDUDUK	-0.001415	0.000603	-2.345246	0.0206

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.663926	Mean dependent var	27.44829
Adjusted R-squared	0.617097	S.D. dependent var	13.97504
S.E. of regression	8.647639	Akaike info criterion	7.271971
Sum squared resid	9123.363	Schwarz criterion	7.650182
Log likelihood	-491.0380	Hannan-Quinn criter.	7.425665
F-statistic	14.17740	Durbin-Watson stat	2.668195
Prob(F-statistic)	0.000000		

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.350890	(13,122)	0.1934
Cross-section Chi-square	18.827869	13	0.1285

Cross-section fixed effects test equation:
 Dependent Variable: KEMISKINAN
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/23/24 Time: 08:11
 Sample: 2012 2022
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 14
 Total panel (unbalanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.934164	2.259363	-1.298669	0.1963
BELANJAPEMERINTAH	9.11E-09	2.54E-09	3.582955	0.0005
TPAK	7.75E-05	2.01E-05	3.850171	0.0002
KRIMINALITAS	0.029036	0.006402	4.535270	0.0000
KEPADATANPENDUDUK	-0.001458	0.000597	-2.444138	0.0158

R-squared	0.615550	Mean dependent var	27.44829
Adjusted R-squared	0.604158	S.D. dependent var	13.97504
S.E. of regression	8.792525	Akaike info criterion	7.220742
Sum squared resid	10436.65	Schwarz criterion	7.325800
Log likelihood	-500.4519	Hannan-Quinn criter.	7.263434
F-statistic	54.03765	Durbin-Watson stat	2.451281
Prob(F-statistic)	0.000000		

RANDOM EFFECT

Dependent Variable: KEMISKINAN
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/23/24 Time: 08:13
 Sample: 2012 2022
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 14
 Total panel (unbalanced) observations: 140
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.934164	2.222132	-1.320427	0.1889
BELANJAPEMERINTAH	9.11E-09	2.50E-09	3.642985	0.0004
TPAK	7.75E-05	1.98E-05	3.914678	0.0001
KRIMINALITAS	0.029036	0.006297	4.611255	0.0000
KEPADATANPENDUDUK	-0.001458	0.000587	-2.485088	0.0142
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		0.000000	0.0000	
Idiosyncratic random		8.647639	1.0000	
Weighted Statistics				
R-squared	0.615550	Mean dependent var	27.44829	
Adjusted R-squared	0.604158	S.D. dependent var	13.97504	
S.E. of regression	8.792525	Sum squared resid	10436.65	
F-statistic	54.03765	Durbin-Watson stat	2.451281	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.615550	Mean dependent var	27.44829	
Sum squared resid	10436.65	Durbin-Watson stat	2.451281	

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.645971	4	0.0468

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
BELANJAPEMERINTAH	0.000000	0.000000	0.000000	0.0050
TPAK	0.000069	0.000078	0.000000	0.2128
KRIMINALITAS	0.017722	0.029036	0.000025	0.0234
KEPADATANPENDUDUK	-0.001415	-0.001458	0.000000	0.7621

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KEMISKINAN
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/23/24 Time: 08:14
 Sample: 2012 2022
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 14
 Total panel (unbalanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.502354	2.376008	-2.315797	0.0222
BELANJAPEMERINTAH	1.46E-08	3.18E-09	4.596951	0.0000
TPAK	6.90E-05	2.09E-05	3.296268	0.0013
KRIMINALITAS	0.017722	0.008035	2.205521	0.0293
KEPADATANPENDUDUK	-0.001415	0.000603	-2.345246	0.0206
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.663926	Mean dependent var	27.44829	
Adjusted R-squared	0.617097	S.D. dependent var	13.97504	
S.E. of regression	8.647639	Akaike info criterion	7.271971	
Sum squared resid	9123.363	Schwarz criterion	7.650182	
Log likelihood	-491.0380	Hannan-Quinn criter.	7.425665	
F-statistic	14.17740	Durbin-Watson stat	2.668195	
Prob(F-statistic)	0.000000			

COMMON EFFECT

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 11/23/24 Time: 08:12

Sample: 2012 2022

Periods included: 11

Cross-sections included: 14

Total panel (unbalanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.934164	2.259363	-1.298669	0.1963
BELANJAPEMERINTAH	9.11E-09	2.54E-09	3.582955	0.0005
TPAK	7.75E-05	2.01E-05	3.850171	0.0002
KRIMINALITAS	0.029036	0.006402	4.535270	0.0000
KEPADATANPENDUDUK	-0.001458	0.000597	-2.444138	0.0158
R-squared	0.615550	Mean dependent var	27.44829	
Adjusted R-squared	0.604158	S.D. dependent var	13.97504	
S.E. of regression	8.792525	Akaike info criterion	7.220742	
Sum squared resid	10436.65	Schwarz criterion	7.325800	
Log likelihood	-500.4519	Hannan-Quinn criter.	7.263434	
F-statistic	54.03765	Durbin-Watson stat	2.451281	
Prob(F-statistic)	0.000000			

UJI LAGRANGE MULTIPLIER

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.000612 (0.9803)	5.040841 (0.0248)	5.041453 (0.0247)
Honda	-0.024734 (0.5099)	-2.245182 (0.9876)	-1.605073 (0.9458)
King-Wu	-0.024734 (0.5099)	-2.245182 (0.9876)	-1.703289 (0.9557)
Standardized Honda	0.249232 (0.4016)	-2.138928 (0.9838)	-5.415538 (1.0000)
Standardized King-Wu	0.249232 (0.4016)	-2.138928 (0.9838)	-5.488684 (1.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	0.000000 (1.0000)

